

Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Tahfidz Al Quran Bagi Orang Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Jamban Umum Oleh Masyarakat Di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

Sintya Nelwan¹, Tety Thalib² Lutfia Bakari³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Sintya Nelwan, e-mail: nelwansintya@gmail.com¹ tetythalib72@gmail.com² bakariluthfia@gmail.com³

Published: June , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pemanfaatan jamban umum oleh masyarakat di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, yang ditinjau dari aspek sosialisasi, edukasi, dan kerja sama antar instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam aspek sosialisasi masih sangat minim. Kurangnya penyuluhan dan kampanye mengenai pentingnya perilaku hidup bersih menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jamban umum. Pada aspek edukasi, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang sanitasi juga belum memadai akibat tidak adanya program pendidikan kesehatan yang intensif dari pihak desa maupun instansi terkait. Sementara itu, pada aspek kerja sama antar instansi, belum ada sinergi yang optimal antara Pemerintah Desa dengan Puskesmas, tokoh masyarakat, dan lembaga lainnya dalam mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif untuk memperkuat sosialisasi, meningkatkan edukasi, dan membangun kerja sama lintas sektor dalam mendukung pemanfaatan jamban sehat oleh masyarakat desa.

Keywords: Pemerintah Desa; Jamban Umum; Sosialisasi; Edukasi; Sanitasi; Kerja Sama Instansi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia masih menjadi negara dengan wilayah daerahnya memiliki permasalahan kesehatan lingkungan dan sanitasi, yang ditandai tingginya angka kesakitan dan angka kematian penyakit. Hal ini banyak ditemukan di daerah pedesaan dengan sanitasi yang buruk. Masalah kesehatan lingkungan, khususnya pembuangan tinja, merupakan masalah kesehatan prioritas dan harus segera diselesaikan. Pengelolaan jamban yang tidak memenuhi syarat kesehatan menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu dasar dari strategi sanitasi yang efektif yaitu memastikan cakupan yang tinggi terhadap penggunaan jamban sehat.

Pembangunan kesehatan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Peningkatan derajat kesehatan dapat terwujud melalui terciptanya masyarakat Indonesia yang ditandai dengan perilaku masyarakat di lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil serta merata. Derajat kesehatan dipengaruhi oleh

banyak faktor yaitu : lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Faktor lingkungan dan perilaku sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Termasuk lingkungan yaitu pemukiman atau perumahan, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum, air dan udara bersih, teknologi, pendidikan, sosial dan ekonomi. Sedangkan perilaku tergambar dalam kebiasaan sehari-hari seperti pola makan, kebersihan perorangan, gaya hidup, dan perilaku terhadap upaya kesehatan.

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong masyarakat untuk membangun dan menggunakan jamban secara maksimal. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi desa dimana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam beberapa masalah dibidang kesehatan melalui berbagai upaya, termasuk program pembangunan jamban sehat, sosialisasi tentang pentingnya sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan dan merawat fasilitas sanitasi yang ada, pemerintah desa dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan akses terhadap sanitasi yang layak dapat diperluas dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga kesehatan masyarakat desa dapat terjaga dengan baik.

Masalah sanitasi, khususnya pemanfaatan jamban, masih menjadi isu penting di banyak desa di Indonesia. Meskipun pembangunan jamban telah menjadi program pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, namun pemanfaatan jamban secara optimal masih menjadi tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain: pertama, banyak masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki dan menggunakan jamban sehat. Mereka masih terbiasa buang air besar sembarangan, baik disungai, kebun, atau tempat terbuka lainnya. Kedua, pembangunan jamban membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi kendala bagi mereka untuk memiliki jamban sendiri. Ketiga, masyarakat kurang memahami bagaimana cara merawat dan menjaga kebersihan jamban, sehingga jamban yang sudah dibangun menjadi tidak berfungsi dengan baik.

Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong masyarakat untuk membangun dan menggunakan jamban secara maksimal. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi desa dimana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam beberapa masalah dibidang kesehatan melalui berbagai upaya, termasuk program

pembangunan jamban sehat, sosialisasi tentang pentingnya sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan dan merawat fasilitas sanitasi yang ada, pemerintah desa dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warganya.

Desa Kayubulan adalah salah satu Desa dari 9 desa yang ada dikecamatan Batudaa Pantai yang terbentuk pada tahun 1955. Desa kayubulan terdiri dari 6 dusun sebagian besar penduduk desa kayubulan adalah nelayan dan petani. Jumlah data-data yang memiliki dan yang tidak memiliki jamban Di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai diantaranya adalah:

Tabel 1.1 Data Jumlah Jamban Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai

No	Nama Dusun	Yang Memiliki Jamban	Yang Tidak Memiliki Jamban	Jumlah KK
1.	Pentadu Timur	176	23	199
2.	Pentadu Barat	154	21	175
3.	Padengo	125	23	176
4.	Dunggala	37	17	76
5.	Apitalao	44	38	106
6.	Tenilo	19	27	46

Sumber: Data Diperoleh Pemerintah Desa, 2025

Berdasarkan data jumlah jamban diatas di desa kayubulan banyak yang sudah memiliki jamban keluarga akan tetapi masih ada juga yang belum mempunyai jamban keluarga, maka dari itu pemerintah desa menyediakan bantuan berupa jamban umum yang berjumlah 4 (empat) unit. Dari keempat jamban umum yang tersedia hanya 2 (dua) yang masih layak dipakai oleh warga masyarakat yaitu jamban umum yang terletak di dusun padengo dan di dusun apitalao.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo belum optimal dilakukan. kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa terkait pentingnya jamban sehat kepada masyarakat. Sosialisasi yang tidak optimal menyebabkan banyak masyarakat belum memahami dampak buruk dari kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS), baik bagi kesehatan pribadi maupun lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan jamban sehat. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka diare, stunting, dan penyakit menular lainnya yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

Masalah lain yang ditemukan adalah peran pemerintah desa dan juga pihak puskesmas dalam memberikan penyuluhan dan edukasi terkait sanitasi sehat sering kali

masih terbatas baik dari segi intensitas maupun cakupannya. Kurangnya edukasi ini juga sering dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan sumber daya, dan kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun. Tanpa pemahaman yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk mengubah perilaku mereka dan mendukung program kesehatan lingkungan yang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya jamban sehat.

Kemudian masalah yang lainnya kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan instansi terkait, instansi terkait seperti pihak puskesmas memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis dan kebijakan, namun kurangnya sinergi menyebabkan program ini berjalan lambat dan kurang optimal. Padahal, dengan adanya kerja sama yang baik, mulai dari penyuluhan, penyediaan bantuan fasilitas, hingga pendampingan berkelanjutan, program ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam membangun sinergi antara berbagai pihak guna meningkatkan kesadaran dan kepemilikan jamban sehat demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang *“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Jamban Umum Oleh Masyarakat Di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai ”*

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

Pertama, kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat tentang pemanfaatan jamban umum; *Kedua*, kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan jamban sehat; *ketiga*, kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan juga pihak puskesmas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi permasalahan tersebut, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam pemanfaatan jamban umum oleh masyarakat Di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai. Olehnya penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemanfaatan jamban umum oleh masyarakat Di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di

lapangan, khususnya terkait peran Pemerintah Desa dalam pemanfaatan jamban umum oleh masyarakat di Desa Kayubulan. Metode ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti menggali makna dari pengalaman, pandangan, dan perilaku masyarakat serta aparat desa melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat naratif atau deskriptif berupa kata-kata, peristiwa, dan situasi alamiah tanpa manipulasi variabel (Anggito & Setiawan, 2018). Selain itu, menurut Ismail et al. (2024), pendekatan kualitatif deskriptif efektif untuk memahami realitas sosial secara menyeluruh, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap sanitasi lingkungan. Hasil dari metode ini kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam dengan kutipan langsung dari narasumber sebagai bukti faktual yang mendukung interpretasi peneliti.

Kajian Teori

Konsep Peran

Dalam konteks sosial dan kelembagaan, peran merupakan unsur penting dalam menjelaskan tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan dari individu atau institusi dalam suatu struktur sosial. Menurut Ismanto (2022), peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik yang bersifat formal maupun informal. Dengan demikian, ketika berbicara mengenai peran pemerintah desa, hal ini merujuk pada ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa, baik dalam bentuk kebijakan, tindakan, maupun komunikasi sosial dalam menangani kebutuhan publik, seperti penyediaan dan pemanfaatan jamban umum.

Lebih jauh, Majib (2023) menegaskan bahwa peran muncul secara teratur karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok. Dalam hal ini, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak dan fasilitator dalam masyarakat. Keberadaan jamban umum, misalnya, tidak cukup hanya dengan dibangun secara fisik. Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa sarana tersebut digunakan secara optimal oleh masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pengawasan penggunaan fasilitas. Peran yang dijalankan secara konsisten ini akan berdampak pada pola perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Menurut Lepa dkk. (2019), peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memberikan hasil sesuai dengan harapan masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, status pemerintah desa sebagai pemegang otoritas lokal menuntut adanya keterlibatan aktif dalam memastikan pemanfaatan jamban umum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mencakup tiga aspek penting yaitu penerapan aturan lokal yang mengatur penggunaan jamban umum, penginternalisasian

norma-norma kebersihan kepada masyarakat, serta penyusunan strategi partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana tersebut.

Dengan merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, peran pemerintah desa dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai fungsi sosial, administratif, dan edukatif dalam mengarahkan, memfasilitasi, serta mengawasi perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan jamban umum. Tidak hanya sekadar menyediakan infrastruktur, namun juga memastikan bahwa keberadaan jamban umum menjadi bagian dari perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat. Pemerintah desa perlu menunjukkan kepemimpinan lokal yang adaptif, komunikatif, dan berkelanjutan dalam proses ini.

Akhirnya, peran pemerintah desa di Desa Kayubulan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan harapan masyarakatnya. Sebagaimana telah dijelaskan, peran bukan hanya tindakan formal yang tertulis dalam regulasi desa, tetapi juga mencakup nilai-nilai partisipasi, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan jamban umum menjadi indikator nyata dari keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan perannya. Ini mempertegas bahwa peran adalah refleksi dari posisi dan tanggung jawab yang terstruktur dalam sistem sosial desa (Ismanto, 2022; Majib, 2023; Lepa et al., 2019).

Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, yang memainkan peran strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Dalam kerangka tugas dan fungsinya, pemerintah desa memiliki empat fungsi utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi ini dijalankan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, serta prinsip persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika (UU No. 6 Tahun 2014).

Konsepsi ini menempatkan pemerintah desa bukan sekadar sebagai pelaksana administrasi, tetapi sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan sosial di wilayahnya. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tujuan bernegara, seperti perlindungan terhadap rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam perdamaian dunia dapat dimulai dari lingkup terkecil, yaitu desa (Kementerian Desa, 2015).

Undang-Undang yang sama juga mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta

mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif dari pusat, tetapi juga memiliki otonomi dalam mengelola urusan lokal sesuai dengan karakteristik, nilai, dan tradisi masyarakat desa.

Pemerintah desa, oleh karena itu, memiliki kedudukan unik sebagai perpanjangan tangan negara sekaligus sebagai representasi masyarakat lokal. Pemerintah desa diberi ruang untuk mengembangkan tata kelola yang berbasis partisipasi dan kearifan lokal. Kepala desa dan perangkatnya berperan dalam merumuskan kebijakan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan sanitasi, hingga program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat secara langsung di tingkat lokal. Pemerintah desa menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan nasional yang berjenjang, berada di bawah pemerintah kabupaten/kota. Namun, keberadaannya sangat menentukan keberhasilan kebijakan nasional, karena desa adalah ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2016).

Apa Itu jamban?

Jamban merupakan salah satu sarana dasar sanitasi yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dalam pengertian umumnya, jamban keluarga adalah bangunan yang dirancang untuk membuang dan menampung kotoran manusia ke tempat tertentu agar tidak mencemari lingkungan dan tidak menjadi sumber penularan penyakit (Kusnaputranto, 2015). Pengelolaan jamban yang baik tidak hanya menjadi aspek teknis semata, melainkan juga berhubungan erat dengan perilaku dan pengetahuan masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat pemanfaatan jamban yang sehat sangat ditentukan oleh kesadaran individu dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memahami risiko sanitasi yang buruk.

Jenis-jenis jamban di masyarakat cukup beragam, masing-masing dengan karakteristik dan tingkat efektivitas dalam menjaga sanitasi. Proverawati (2019) mengelompokkan jamban menjadi beberapa tipe, di antaranya jamban empang, jamban kimia, jamban cubluk, dan jamban leher angsa. Jamban empang atau overhung latrine, misalnya, dibangun di atas permukaan air seperti sungai atau empang dan tidak memiliki penampungan tinja, sehingga dianggap tidak sehat karena langsung mencemari air. Sementara itu, jamban kimia yang biasa ditemukan di tempat umum dan transportasi

memiliki sistem disinfeksi menggunakan bahan kimia, namun bersifat sementara. Jamban cubluk lebih sederhana dan umum ditemukan di pedesaan, sedangkan jamban leher angsa merupakan tipe yang paling higienis karena mampu mencegah bau dan serangga berkat sistem air penghalang.

Agar jamban dapat dikategorikan sebagai jamban sehat, terdapat sejumlah kriteria teknis dan fungsional yang harus dipenuhi. Proverawati (2019) menyebutkan beberapa syarat seperti: tidak mencemari air minum, tidak menimbulkan bau, tidak dapat diakses oleh serangga atau tikus, serta mudah dibersihkan dan aman digunakan. Selain itu, keberadaan atap dan dinding pelindung, ventilasi dan pencahayaan yang cukup, serta fasilitas pendukung seperti sabun dan air bersih turut menentukan efektivitas jamban sebagai sarana kesehatan lingkungan. Jamban yang tidak memenuhi syarat tersebut justru berpotensi menjadi sumber penyakit dan mencemari tanah serta air di sekitarnya.

Fungsi utama jamban sehat adalah sebagai *sanitation barrier* penghalang penularan penyakit yang berasal dari kotoran manusia. Menurut Entjang (2015), penyakit seperti diare, kolera, hepatitis A, dan tifus sangat rentan menyebar melalui air dan makanan yang terkontaminasi tinja. Jamban sehat dapat memutus rantai penularan ini dengan cara mengisolasi kotoran secara aman dari lingkungan dan manusia. Tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga turut menjaga kebersihan air tanah, sungai, serta menciptakan estetika lingkungan yang lebih baik.

Selain mencegah penyakit, jamban sehat juga mampu melindungi masyarakat dari serangan serangga perantara penyakit. Serangga seperti lalat dan kecoa sering bertelur di kotoran karena kandungan nutrisinya, dan kemudian menjadi agen penularan ketika berpindah ke makanan atau permukaan lain. Dalam iklim tropis seperti di Indonesia, risiko ini menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan jamban sehat sangat berperan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat, khususnya di desa-desa seperti Kayubulan, di mana ketersediaan sanitasi yang layak menjadi tolok ukur kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Berdasarkan keseluruhan metode dan konsep peneliti menyusun kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kayubulan terdiri dari pegunungan dan dataran, oleh sebagian masyarakat dijadikan daerah perkebunan kelapa dan sebagian dataran dimanfaatkan sebagai rumah penduduk, kemudian yang sebagian lagi adalah pegunungan yang berbatu kadas dan berbatu kapur, sedangkan untuk puncak maupun gunung yang tertinggi adalah gunung Alumeni dengan ketinggian + 500 M dari permukaan laut, dan ditumbuhi hutan belukar yang didiami oleh binatang maupun hewan liar seperti babi hutan, anowa, rusa, ular dan lain sebagainya. Gunung ini memiliki mata air yang mengalir kedua buah sungai, yaitu sungai Butaiyodaa yang artinta sungai belah besar dan yang satu lagi disebut sungai Molotingo, artinya sungai asam, oleh karena disekitar sungai tersebut banyak ditumbuhi pohon manga yang buahnya asam.

Sebagaimana telah dipaparkan dan dijelaskan secara sistematis tentang wilayah Desa Kayubulan. Desa Kayubulan adalah Desa yang ketika itu merupakan hutan belukar. Pada tahun 1820 Daerah yang terkenal dengan penghasilan laut dan pertanian ini telah menjadi daerah perkampungan sehingga melahirkan suatu perkampungan yang memiliki struktur pemerintahan dan menunjuk atau memiliki salah seorang yang menjadi Kepala Kampung, saat itu adalah yang bernama Akili Mohamad (Awad Sau) Tahun 1820. Dari tahun 1820 sampai tahun 1954 Desa kayubulan merupakan Desa yang bergabung dalam wilayah pemerintahan Kota Gorontalo. Kemudian pada tahun 1955 Desa Kayubulan telah bergabung dengan Wilayah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

PEMBAHASAN

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap awal dan fundamental dalam proses penyadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, termasuk penggunaan jamban umum. Di Desa Kayubulan, aspek sosialisasi yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya jamban umum ternyata belum dijalankan secara optimal. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat di desa ini umumnya belum mendapatkan penyuluhan sistematis yang mengarahkan mereka pada pemahaman tentang bahaya buang air besar sembarangan dan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ketidakterlibatan aktif Pemerintah Desa dan tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat memperburuk rendahnya literasi sanitasi masyarakat.

Minimnya kegiatan sosialisasi juga memengaruhi kebiasaan masyarakat yang cenderung masih mempertahankan praktik lama yang tidak sehat. Hal ini diperparah dengan kurangnya materi promosi kesehatan yang disampaikan secara visual, lisan, atau digital. Menurut penelitian oleh Suratri dan Jovina (2023), keberhasilan Program Indonesia Sehat sangat bergantung pada intensitas dan kualitas sosialisasi yang dilakukan

oleh aparat desa dan tenaga kesehatan. Dalam konteks Desa Kayubulan, tidak adanya penyuluhan menciptakan kekosongan informasi yang kemudian berdampak pada rendahnya pemanfaatan jamban umum.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan komunikasi interpersonal dan budaya lokal. Dalam penelitian oleh Yuliastina dan Inayati (2021), dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui media komunikasi luar ruangan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya jamban sehat. Sayangnya, Pemerintah Desa Kayubulan belum mengadopsi pendekatan serupa yang memadukan edukasi visual, simbolik, dan berbasis komunitas dalam menyampaikan pesan-pesan sanitasi.

Hal ini diperkuat pula oleh studi Rahmatika et al. (2022) yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Puskesmas dalam menyusun strategi sosialisasi penggunaan jamban sehat di Desa Jipang, Banyumas. Mereka menemukan bahwa keberhasilan kampanye jamban sehat tidak bisa dicapai tanpa keterlibatan aktif pihak desa dalam proses advokasi dan komunikasi. Dari sisi regulatif, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pembinaan kemasyarakatan, yang seharusnya mencakup kegiatan sosialisasi kesehatan lingkungan.

Salah satu penyebab utama stagnasi sosialisasi di Kayubulan adalah rendahnya prioritas pemerintah desa terhadap isu kesehatan lingkungan. Padahal, dalam konteks sanitasi, kesadaran kolektif tidak tumbuh secara spontan tetapi melalui intervensi terarah. Dalam jurnal yang ditulis oleh Syamsuadi et al. (2023), dijelaskan bahwa keberhasilan intervensi berbasis desa sangat bergantung pada keaktifan pemerintah desa sebagai inisiator gerakan sosialisasi.

Berdasarkan data lapangan, sebagian masyarakat menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi tentang pentingnya menggunakan jamban umum yang sehat. Hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem komunikasi antara pemerintah desa dan warganya. Sebagaimana dijelaskan oleh Armini dan Triharini (2022), salah satu indikator keberhasilan promosi kesehatan adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengenali isu kesehatannya sendiri, yang dapat dicapai melalui sosialisasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis dari Pemerintah Desa Kayubulan untuk merancang program sosialisasi sanitasi berbasis komunitas. Program ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, kader posyandu, dan pemuda desa sebagai agen perubahan. Strategi yang terstruktur dan partisipatif ini telah terbukti efektif dalam penelitian Fithri et al. (2024), yang menunjukkan bahwa keterlibatan karang taruna dalam

program STBM mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan pemanfaatan jamban sehat.

Edukasi

Edukasi merupakan instrumen penting dalam membentuk pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya membentuk perilaku. Di Desa Kayubulan, edukasi terkait pentingnya penggunaan jamban umum masih sangat minim. Berdasarkan observasi lapangan, masih banyak warga yang belum memahami keterkaitan antara jamban sehat dan pencegahan penyakit. Ketika edukasi dari pemerintah desa tidak dilakukan secara intensif, maka tidak tercipta perubahan perilaku yang signifikan, sehingga praktik buang air besar sembarangan masih terus terjadi.

Penelitian Ulina et al. (2021) menjelaskan bahwa edukasi sanitasi yang terstruktur mampu membentuk kesadaran jangka panjang dalam masyarakat. Edukasi ini bukan hanya berupa informasi, namun melibatkan aspek motivasi dan pembentukan sikap. Dalam konteks Desa Kayubulan, pemerintah desa belum mengoptimalkan potensi lokal seperti peran tokoh masyarakat atau guru sebagai agen edukatif yang dapat menyampaikan pesan penting tentang sanitasi.

Tidak hanya itu, kurangnya media informasi seperti poster, leaflet, maupun kampanye langsung dari pemerintah desa menunjukkan bahwa edukasi belum menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Temuan serupa juga disampaikan dalam penelitian oleh Wijaya (2023) yang menyoroti pentingnya pengembangan edukasi berbasis visual dan praktik langsung di desa-desa dalam upaya mendorong pemanfaatan fasilitas sanitasi.

Faktor ekonomi turut berpengaruh terhadap keberhasilan edukasi. Banyak keluarga miskin di Desa Kayubulan yang tidak memprioritaskan penggunaan jamban umum karena menganggapnya tidak penting, akibat dari minimnya pemahaman mereka. Studi oleh Rahmatika dan Rejeki (2022) menegaskan bahwa edukasi yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masyarakat sasaran agar dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik.

Edukasi sanitasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan bukan hanya bersifat proyek sesaat. Pemerintah desa dapat menyusun kalender edukasi tahunan yang melibatkan sekolah, Puskesmas, serta organisasi desa seperti PKK dan Karang Taruna. Seperti yang ditunjukkan oleh Armini et al. (2022), edukasi berkelanjutan yang dilakukan kepada kader kesehatan dan remaja di desa berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih.

Salah satu penyebab lemahnya edukasi di Kayubulan adalah tidak adanya pelatihan khusus bagi perangkat desa mengenai materi-materi sanitasi. Tanpa kapasitas yang memadai, penyampaian edukasi menjadi tidak efektif. Hal ini senada dengan

temuan penelitian oleh Azis et al. (2023) yang menunjukkan pentingnya pelatihan kader lokal dan pemerintah desa dalam mendukung implementasi pendekatan keluarga sehat dan akses jamban.

Dengan demikian, pemerintah desa perlu merancang sistem edukasi sanitasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga persuasif dan adaptif terhadap karakter masyarakat lokal. Ini bisa berupa kunjungan rumah, dialog warga, serta simulasi penggunaan jamban yang sehat. Pendekatan ini terbukti berhasil dalam program pemberdayaan Karang Taruna dalam pelaksanaan STBM di Depok (Fithri et al., 2024).

Kerja Sama Antar Instansi

Kerja sama antar instansi merupakan faktor kunci dalam memperkuat infrastruktur dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jamban umum. Namun di Desa Kayubulan, kerja sama antara Pemerintah Desa, Puskesmas, dan lembaga sosial lainnya masih sangat lemah. Hal ini berdampak pada terhambatnya sinergi dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif. Tidak adanya pembagian peran dan tugas yang jelas menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab atau bahkan ketidakaktifan pihak-pihak yang semestinya berperan penting.

Studi oleh Syukaisih et al. (2024) menjelaskan bahwa program sanitasi yang efektif memerlukan dukungan lintas sektor yang terdiri dari aparat desa, tenaga kesehatan, dan LSM yang berkompeten. Dalam implementasinya, kerja sama ini bukan hanya berbentuk koordinasi administratif, tetapi juga pelaksanaan bersama program penyuluhan, pendampingan, dan monitoring di lapangan. Ketidakhadiran kolaborasi semacam ini di Desa Kayubulan menyebabkan kurangnya percepatan dalam pembangunan perilaku hidup bersih.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk bekerja sama dengan lembaga lain dalam bidang kesehatan. Namun, realisasi peraturan tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Menurut Purba et al. (2020), banyak desa belum membentuk forum musyawarah lintas sektor yang bisa menjadi wadah diskusi isu kesehatan, termasuk sanitasi.

Salah satu kendala utama kerja sama antarinstansi di Desa Kayubulan adalah lemahnya komunikasi lintas lembaga. Tidak ada forum atau ruang diskusi rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sanitasi, seperti Puskesmas, PKK, BPD, dan tokoh masyarakat. Penelitian oleh Rahmatika (2022) menunjukkan bahwa desa yang memiliki forum komunikasi sanitasi lintas instansi terbukti lebih cepat mencapai target desa bebas buang air besar sembarangan.

Kerja sama juga seharusnya difokuskan pada pemanfaatan sumber daya secara bersama. Contohnya, Puskesmas dapat menyediakan tenaga kesehatan dan materi edukasi, sementara pemerintah desa menyiapkan tempat dan pendanaannya dari dana

desa. Kolaborasi ini terbukti efektif di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dalam implementasi pendekatan keluarga sehat PIS-PK (Azis et al., 2023).

Di sisi lain, kolaborasi juga perlu melibatkan masyarakat secara langsung. Tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok keagamaan seharusnya diberdayakan sebagai mitra dalam menyampaikan pesan-pesan sanitasi. Hal ini ditegaskan oleh Trisanti dan Himawan (2022) bahwa pelibatan masyarakat dalam edukasi membuat informasi lebih cepat diterima dan diaplikasikan oleh warga.

Akhirnya, Pemerintah Desa Kayubulan perlu segera merintis platform koordinasi lintas instansi agar seluruh pihak bisa berkontribusi dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan pemanfaatan jamban umum. Tanpa kerja sama yang sistematis dan berkelanjutan, upaya peningkatan sanitasi di desa akan berjalan lambat dan tidak menyentuh akar permasalahan yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan tiga indikator utama yang dikaji sosialisasi, edukasi, dan kerja sama antar instansi dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Kayubulan dalam pemanfaatan jamban umum oleh masyarakat masih belum optimal. Tidak adanya sosialisasi yang terstruktur menyebabkan rendahnya kesadaran warga, edukasi yang minim menghambat pembentukan perilaku hidup sehat, dan lemahnya kerja sama antarinstansi membuat program sanitasi tidak berjalan efektif. Diperlukan intervensi terpadu yang melibatkan seluruh elemen desa secara aktif dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Armini, N. K., & Triharini, M. (2022). Promosi Kesehatan dan Pendidikan Perilaku. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 14(2), 120–128. <https://www.researchgate.net>
- Azis, R., AlamK, S., & Yusuf, A. (2023). Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Sulawesi Selatan. *Jurnal Kesehatan Global*, 7(1), 25–33. <https://www.researchgate.net>
- Entjang, I. (2015). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Fithri, N. K., Nuncandra, F., & Anggraini, N. V. (2024). Pemberdayaan Karang Taruna dalam STBM di Depok. *Jurnal Kreativitas Remaja Desa*, 9(1), 51–60. <https://www.researchgate.net>
- Ismanto, B. (2022). *Sosiologi Dasar*. Jakarta: Cipta Media.
- Kusnaputranto, H. (2015). *Sanitasi Lingkungan dan Kesehatan*. Jakarta: UI Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). *Pedoman Umum Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Implementasi UU Desa: Evaluasi dan Penguatan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- Lepa, Y., Syarifuddin, & Nurhalimah. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Makassar: Cahaya Ilmu Press.
- Majib, G. A. (2023). *Peran Sosial dan Kepemimpinan Lokal*. Surabaya: Pustaka Rakyat.
- Proverawati, A. (2019). *Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Purba, R. D., Siregar, H., & Hutagalung, A. (2020). Strategi Kolaboratif Pemerintah Desa dalam Sanitasi Lingkungan. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(3), 45–54. <https://www.researchgate.net>
- Rahmatika, N. T., & Rejeki, D. S. S. (2022). Pemanfaatan Jamban Sehat di Desa Jipang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 6(2), 85–94. <https://www.researchgate.net>
- Suratri, M. A. L., & Jovina, T. A. (2023). Pengetahuan Masyarakat dalam Program PIS-PK. *Jurnal Penelitian Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 23–31. <https://www.researchgate.net>
- Syukaisih, S., Nurjannah, F., & Hidayat, T. (2024). Sinergi Lintas Sektor dalam Program Jamban Umum. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 9(1), 12–22. <https://www.researchgate.net>
- Trisanti, I., & Himawan, R. (2022). Perilaku Hidup Bersih di Rumah Tangga. *Prosiding University Research for Society (URS)*, 3(2), 133–141. <https://www.researchgate.net>
- Ulina, D., Santika, N., & Halimah, Y. (2021). Pengetahuan Masyarakat dan Tindakan Kesehatan di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 13(1), 77–84. <https://www.researchgate.net>
- Wijaya, E. P. (2023). Pengaruh Edukasi Visual Terhadap Pemanfaatan Jamban Sehat. *Jurnal Promosi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1), 18–26. <https://www.researchgate.net>
- Yulastina, R., & Inayati, H. (2021). Komunikasi Luar Ruangan dalam Edukasi Sanitasi di Wilayah Terpencil. *Jurnal Batoboh: Komunikasi Pembangunan*, 10(2), 55–66. <https://www.researchgate.net>